

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi gadai emas syariah (ar-rahn) di PT BUGAS (Buana Gadai Syariah) Kopena Pekalongan serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas syariah yang diteliti menggunakan akad rahn sebagai akad penahanan barang jaminan, akad qardh sebagai pemberian pinjaman, dan akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak pengelola dan nasabah, serta dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan gadai emas syariah di PT BUGAS Kopena Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, khususnya dalam aspek akad, objek gadai, serta mekanisme penyimpanan barang jaminan. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian dengan fatwa yaitu penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang didasarkan pada nominal pinjaman dan persentase tertentu, padahal Fatwa DSN-MUI secara tegas melarang penentuan biaya berdasarkan besar kecilnya pinjaman dan mewajibkan biaya ditetapkan berdasarkan biaya riil yang nyata diperlukan, sehingga praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik gadai syariah serta menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip dan fatwa syariah.

Kata Kunci: Gadai Syariah, Rahn Emas, Fatwa DSN-MUI, PT BUGAS.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia gold pawning (arrahn) at PT BUGAS (Buana Gadai Syariah) Kopena Pekalongan and to assess its compliance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The sharia gold pawning product under investigation utilizes a rahn contract as the collateral retention agreement, a qardh contract for the loan provision, and an ijarah contract as the basis for collecting maintenance and storage fees. The study employed a descriptive qualitative approach, utilizing various data collection techniques, including interviews with managers and customers, documentation, and observation. The results indicate that, in general, the implementation of sharia gold pawning at PT BUGAS Kopena Pekalongan complies with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. This includes adherence to the contract terms, the management of pawned objects, and the mechanisms for collateral storage. However, there are some discrepancies with the fatwa. Notably, the determination of maintenance and storage fees based on the nominal loan amount and a specific percentage is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa, which expressly prohibits setting fees based on the size of the loan. Instead, it requires that fees be based on the actual costs incurred. This practice is inconsistent with sharia principles. This research is expected to contribute to the strengthening of sharia pawn practices and serve as a reference for sharia financial institutions in enhancing their compliance with sharia principles and fatwas.

Keywords: sharia pawning, Gold Rahn, Fatwa DSN-MUI, PT BUGAS